

## KPK Didesak Panggil Bobby Nasution .....

Dari Halaman 1

abatannya sebagai Wali Kota Medan dari TA 2021 hingga 2024. Koalisi ini menuding adanya ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan Pemko Medan yang diduga merugikan negara dalam sejumlah proyek, antara lain:

- \* Tender pembangunan/rehabilitasi gedung Kejaksaan Negeri Medan senilai Rp2,4 miliar APBD 2022 yang ambruk tak lama setelah dibangun.
- \* Proyek gagal pemasangan lampu jalan

## Jangan Korupsi: Antara Seruan Moral dan .....

Dari Halaman 1

juga menjadi beban keluarga. Ajakan ini tentu pantas diapresiasi. Dalam teori pemerintahan yang bersih, kepala daerah memang menjadi role model moral bagi bawahannya. Ia harus memberikan sinyal kuat bahwa pemerintahan yang dipimpinnya tidak akan mentoleransi penyimpangan. Seruan Bobby dapat dibaca sebagai isyarat adanya tekad memperbaiki wajah birokrasi Sumatera Utara yang selama ini tercoreng oleh praktik-praktik koruptif.

Namun, kenyataan tak selalu mudah niat. Banyak pihak meragukan kejujuran pesan itu. Ada yang menilai ucapan Bobby sebatas pencitraan, sebuah langkah politis untuk membangun citra bersih di tengah badai kasus hukum yang mulai menyentuh lingkaran dalam kekuasaannya. Ada pula yang mencurigai bahwa pernyataan itu hanya tameng untuk berjaga-jaga, jika kelak lebih banyak anak buahnya dituduh, ia bisa berkilah telah sejak awal memperingatkan.

Skeptisisme ini bukan tanpa alasan. Sejarah panjang birokrasi di Sumatera Utara dipenuhi daftar hitam kepala daerah, anggota dewan, hingga kepala dinas yang terjerat kasus suap dan gratifikasi. Korupsi bukan sekadar ulah individu, tetapi telah menjadi bagian dari sistem yang rumit dan menyebar luas. Jabatan strategis, dalam banyak kasus, tidak semata diraih karena kapasitas atau dedikasi, melainkan karena koneksi, loyalitas, dan terutama modal.

(dikenal sebagai "Lampu Pocong") senilai Rp 25,7 miliar APBD Medan 2022.

- \* Dugaan korupsi pembangunan 3 gapura APBD Kota Medan 2022.
- \* Dugaan korupsi tanah timbun pembangunan Islamic Center yang bersumber dari revitalisasi Lapangan Medan.
- \* Dugaan korupsi 13 paket pekerjaan drainase atas kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan.

Di ruang-ruang informal, mulai dari warung kopi hingga ruang belakang kantor, kerap terdengar desas-desus soal "harga jabatan." Tak resmi, namun dipercaya cukup valid bahwa untuk duduk di posisi penting, seorang calon harus siap "setor". Jumlahnya tergantung seberapa "basah" jabatan tersebut. Artinya, seberapa besar peluang proyek yang bisa dikelola.

Seseorang yang telah mengeluarkan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk sebuah kursi tentu tidak akan diam begitu saja. Ia akan berusaha keras mengembalikan "investasi". Dan proyek-proyek APBD menjadi lahan empuk yang mudah dipangkas-pangkas keuntungannya. Celakanya, ini kerap diketahui (jika bukan direstui) oleh atasan yang turut berada dalam satu rantai distribusi keuntungan haram.

Di sisi lain, kepala daerah juga tak imun terhadap sistem ini. Seorang calon gubernur yang bertarung di Pilkada harus menggelontorkan dana yang tak sedikit. Mulai dari biaya kampanye, membayar relawan, konsultan, hingga menyuplai logistik dan serangkaian seragam fajar. Biaya ini seringkali melampaui kemampuan pribadi dan keluarga, sehingga muncul pihak ketiga, yakni para pemodal. Dan tentu tak ada investasi politik yang gratis. Ada ekspektasi balik modal, biasanya dalam bentuk proyek pembangunan, konsesi izin, atau jabatan strategis.

Inilah lingkaran setan birokrasi kita. Sistem yang secara struktural membuka ruang besar untuk korupsi terencana. Seperti yang dikatakan Prof. Mahfud MD., sekalipun malaikat jika

Selain itu, KAMAK juga meminta Presiden Republik Indonesia untuk menegur dan mengingatkan Bobby Nasution dan jajarannya atas dugaan ketidakpatuhan pengelolaan keuangan yang merugikan negara, khususnya terkait kasus OTT KPK yang melibatkan orang dekat Gubernur.

Terakhir, KAMAK mendesak KPK untuk kembali memanggil dan memeriksa Akbar Hilmawan Bukhori terkait dugaan suap yang pernah melibatkan mantan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin. (s24/j)

berada dalam sistem ini akan berubah menjadi setan. Maka, meski seruan antikorupsi terus digaungkan, selama akar persoalannya tidak disentuh, semuanya akan menjadi basa-basi. Artinya harus ada lompatan Tindakan yang fundamental.

Jika Bobby Nasution sungguh-sungguh ingin pemerintahannya bersih, setidaknya ia harus mulai dari hulunya. Reformasi sistem rekrutmen pejabat. Pastikan tak ada transaksi dalam proses mutasi, rotasi, atau promosi. Bentuk tim independen untuk menilai kinerja dan integritas calon pejabat. Selain itu, hentikan praktik menjadikan proyek sebagai alat tukar loyalitas politik. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama.

Lebih jauh, Bobby juga perlu membangun sistem nilai di lingkungan pemerintahannya. Bukan hanya dengan ancaman hukum, tetapi dengan pendekatan moral dan religiusitas. Aparatur harus menyadari bahwa bekerja adalah amanah, bukan kesempatan memperkaya diri. Bahwa setiap lembar rupiah yang dikorupsi akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di pengadilan dunia, tapi juga di hadapan Tuhan.

Korupsi tak bisa diakhiri hanya dengan kata-kata. Ia butuh sistem yang bersih, keberanian politik, dan integritas pribadi yang tak tergoyahkan. Rakyat bukan bodoh, mereka tahu mana pemimpin yang benar-benar ingin bersih, dan mana yang sekadar menyelamatkan citra. Sebab dalam soal korupsi, yang dibutuhkan bukan sekadar narasi, tapi bukti dan nyali. (\*)

## KPK Diminta Untuk Tidak Tebang Pilih .....

Dari Halaman 1

betul mencerminkan kebobrokan tata kelola pemerintahan yang sarat dengan praktek-praktek KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang begitu nyata," ungkap Zul Effendi.

Lebih lanjut disampaikannya, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) diharapkan serius dalam mengungkap tuntas kasus yang menyeret

'anak main' Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution ini.

"KPK harus mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya, sampai ke puncak penentu kebijakan, agar dapat ditindak tegas untuk membersihkan pemerintah daerah Sumatera Utara dari praktek-praktek kotor yang dilakoni oknum-oknum birokrat jahat, yang begitu rakusnya memakan uang rakyat dengan sewenang-wenang," harapnya.

Ia juga meminta KPK tidak tebang pilih dalam menangani kasus tersebut, agar kepercayaan publik kepada pemerintah dan penegak hukum kembali baik.

"Dengan keseriusan KPK menangani kasus ini, akan memunculkan harapan baru terhadap kemajuan Sumut. Jangan hanya dijadikan gimik-gimik politik yang tidak memberikan efek jera terhadap segala yang terlibat dengan perilaku koruptif," tandasnya.(A-10)

## Pemprov Sumut Diminta Turun Tangan .....

Dari Halaman 1

lahan seluas 60 hektar.

"Kita juga minta Gubsu Bobby Nasution turun tangan menyikapi kasus yang sedang bergejolak karena telah merembet ke mana-mana, sehingga dikhawatirkan menimbulkan benturan di tengah-tengah masyarakat," kata Ari Sinik – panggilan Azhari AM Sinik, di Medan, Senin (7/7).

Ari Sinik bersama tim yang turun ke lokasi akhir Juni 2025 lalu menemukan sejumlah masalah krusial yang patut dipertanyakan, terkait legalitas lahan yang berada di kawasan Hutasalem.

Setelah dijabat Sri Ana Bulan Hasibuan sebagai Kepala UPTD Pelayanan Sosial Eks Kusta Lau Simomo, Hutasalem, tahun 2023 persoalan lahan yang telah dialihkan status penggunaan dari Dinas Kesehatan Sumut ke Dinas Sosial tahun 2017, terkesan tak jelas status hukumnya.

"Kalau saya lihat di hulunya, persoalan mendasarnya adalah status hukum berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang katanya tersimpan di Dinas Sosial Sumut, tapi hingga kini tak jelas apakah ada atau tidak," katanya.

Kendati demikian, di bawah Sri Ana Bulan Hasibuan, sosok wanita yang selama menjalankan tugas dinas harus bolak-balik dari rumahnya di Medan hingga ke Toba bahkan bermalam di sana, tak kenal lelah terus melakukan upaya-upaya, dengan melakukan langkah hukum sesuai aturan yang berlaku terkait status tanah tersebut.

Hal itu terjadi setelah Keputusan Gubsu No 188.44/555/KPTS/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dari Dinas Kesehatan Provsu ke Dinas Sosial.

Adapun berita acaranya dibuat berdasarkan No 000/132/Dinkes/I/2018 dan No 460/0154 tanggal 5 Januari 2018 yang diteken Agustama yang ketika itu menjabat Kadis Kesehatan, dan Rajali selaku Kadis Sosial.

Namun persoalan tak berhenti di situ. Berdasarkan dokumen yang salinannya diterima Waspada, pihak HKBP merasa keberatan, yang kemudian mengajukan gugatan ke PN Balige, dengan putusan No 63/Pdt.G/2021/PN Blg, tanggal 11 Mei 2022, yang kemudian dimenangkan HKBP.

Selanjutnya terjadi saling gugat hingga Dinas Sosial mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, setelah dinas itu banding ke PT Medan pada 19 September 2022, yang juga dimenangkan HKBP.

Dalam proses banding ini, dengan bukti-bukti kuat, permohonan Dinas Sosial dikabulkan MA dengan putusan 1450 K/Pdt/2023 tanggal 22 Juni 2023. Namun HKBP kemudian menyikapinya dengan melakukan memori peninjauan kembali pada 22 Februari 2024 terhadap putusan MA, yang kini sedang berproses.

Menyikapi hal itu, Direktur Eksekutif LIPPSU Azhari AM Sinik melihat, berdasarkan dokumen yang ada, proses hukum yang dilakukan Dinas Sosial cq UPTD Pelayanan Sosial Eks Kusta Lau Simomo, Hutasalem, disebut berkaitan dengan lahan seluas 500.000 meter persegi di kawasan yang dulunya adalah tanah

dan bangunan bekas rumah sakit Hutasalem atau Rumah Sakit Kusta Hutasalem, yang diklaim milik HKBP.

"Di poin ini, kita sudah masuk ke ranah yang tampaknya merembet ke persoalan lain, termasuk ada dugaan mendepak Kepala UPTD Pelayanan Sosial Eks Kusta Lau Simomo, Hutasalem, Sri Ana Bulan Hasibuan," katanya.

LIPPSU mencium adanya gelagat yang tidak sehat, dengan misalnya mempersoalkan penggunaan anggaran di UPTD berkaitan dengan pengelolaan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM). Dua anggaran yang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat tahun 2023 dan 2024, yang intinya mewajibkan Sri Ana Bulan Hasibuan membayar penuh atas penggunaan dana itu," katanya.

Ketika dikonfirmasi, Sri Ana Bulan Kepala UPTD Pelayanan Sosial Eks Kusta Lau Simomo, Hutasalem, membenarkan dirinya sudah diperiksa, dan telah menjelaskan laporan keuangan sesuai bukti yang ada.

"Namun meski sudah dijelaskan, kita diminta tetap menanggung kerugian atas dana itu sebesar 100 persen dari dua tahun anggaran, berkisar lebih kurang Rp 110 jutaan," sebutnya.

Padahal, di sisi lain, penggunaan dana operasional untuk kendaraan dinas saya pikir sudah meliputi minyak, dan hal yang sama juga berlaku untuk empat kepala seksi di UPTD saya yang menggunakan BBM itu," katanya.

"Kalau saya dicekualikan dari BBM itu, untuk apa Dinas Sosial, yang dijabat Kepala Dinas Asren Nasution mengeluarkan SK penggunaan mobil dinas. Apa mobil dinas tak pakai BBM, terakhir saya dikabari saya terbentur Pergub, yang sepertinya tidak memperkenankan penggunaan anggaran untuk BBM," katanya.

Di sisi lain, sambung Sri Ana Bulan Hasibuan, dirinya mengakui dalam proses pemulihan kondisi lahan yang diduga sudah dirusak, untuk dikembalikan seperti semula, membutuhkan anggaran.

"Kita bersama Satpol PP Sumut, juga ada aparat lain, yang dananya saya tanggung sendiri," ujarnya.

Semua langkah penertiban itu dilakukan Sri Ana Bulan Hasibuan, sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama setelah MA mengabulkan permohonan dengan putusan 1450 K/Pdt/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang salah satu isinya menyebut bahwa tergugat (HKBP) telah melakukan pelanggaran hukum.

Kemudian, menyatakan sah dan berkuat hukum surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No 8963/Kab tanggal 15 Desember 1954, yang menyatakan penggugat (Dinas Sosial) merupakan pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Mampiji, Kecamatan Laguboti, Toba Samosir.

"Kita juga lihat dalam putusannya, tergugat diperintahkan mengosongkan dan menyerahkan lahan tersebut, dan ganti rugi immaterial," ujarnya.

Sri Ana Bulan Hasibuan juga sudah berkoordinasi dengan Forkompinda, termasuk Bupati Toba dan aparat terkait untuk ikut membantu melaksanakan putusan MA.

"Kita ada foto fotonya, salah satunya berisikan penumbangan pohon dan perataan tanah

yang diduga untuk membangun rumah ibadah," sambungny.

Namun anehnya, dalam rapat lintas dinas di ruang Rapat Lantai III Kantor Gubsu lalu, Kamis 3 Juli 2025 Sri Ana Bulan Hasibuan selaku pihak UPTD Pelayanan Sosial Eks Kusta Lau Simomo - Hutasalem, disebut tidak di ikut sertakan dalam rapat tersebut.

"Saya ingin jelaskan semuanya agar jelas, termasuk mempertanyakan legalitas tanah di Hutasalem, yang berdasarkan pengukuran ulang sudah berkurang luasannya dari 60 hektar menjadi 58 hektar, tapi kenapa saya tidak diundang," tanyanya.

Ada Skenario

Menyikapi hal ini, Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerintah Pembangunan Sumut (LIPPSU) Azhari AM Sinik menyayangkan sikap Pemprovsu, termasuk Kadis Sosial Asren Nasution, yang tidak mengkoordinasikan rapat itu dengan pihak terkait, yakni Sri Ana Bulan Hasibuan, malah membawa staf yang tidak berkompeten.

"Kita patut menduga ada apa, pokok persoalannya biar jelas. Di mana itu SHM-nya, katanya dalam rapat itu ada, ada kek mana, ditaruh di kolong langit," katanya.

Kalau diperlihatkan, Ari Sinik menyebutkan, kalau SHM itu ada kemungkinan persoalan tidak separah sekarang ini. "Karenanya, kita mendesak Gubsu untuk mengatasi masalah ini, bahkan kalau perlu KPK turun langsung untuk mengusut," kata Ari Sinik.

LIPPSU menduga ada skenario besar mengeser Sri Ana Bulan, karena wilayah tugasnya di Hutasalem terdapat ada 60 hektar lahan yang sebagian besar hutan.

"Ini rawan disalahgunakan pihak-pihak tertentu untuk bahkan mengambil alih lahan itu guna kepentingan pribadi atau korporasi," kata Ari Sinik.

LIPPSU juga mempertanyakan kinerja Kadis Sosial Asren Nasution dalam menyikapi masalah ini. "Kalau ditunjukkan SHM-nya, persoalan tidak akan serumit ini. Saya menduga Asren ada kepentingan," katanya lagi.

LIPPSU juga setumpuk kasus berkaitan dengan Asren. "Soal Hutasalem, kita desak Gubsu periksa kinerja Asren dan bendaharannya Ririn, kalau perlu copot keduanya. Mereka itu biang persoalan hingga jadi ruwet seperti ini, karena ada pihak bermain termasuk oknum anggota DPRD Sumut, oknum oknum yang bertugas di UPTD Pelayanan Sosial Eks Kusta Lau Simomo, Huasalem.

"Ada oknum yang dilaporkan bermasalah soal rekening listrik, tapi oknum pegawai itu dipindahkan Asren ke Binjai, seakan rekening itu harus ditanggung Bulan," tegasnya.

LIPPSU juga sudah mendengar laporan oknum di UPTD Hutasalem, diduga berkoordinasi dengan oknum di Dinas Sosial, berkomplot untuk menyeret Bulan ke meja hukum.

"Itu sudah dilakukan, tapi gagal, karena Bulan tidak bersalah setelah diperiksa aparat penegak hukum, dan sebagai wanita Bulan saya ketahui gigih dalam menjalankan tugasnya. Terbukti selama 2 tahun, dia berjuang keras menyelesaikan kasus tanah di Hutasalem," pungkas Ari Sinik.(A-10)

## Warga Aceh Tolak .....

Dari Halaman 1

Koordinator Aksi Yulinda, Senin (7/7).

Menurutnya sejauh ini kondisi Aceh sudah aman pasca 19 tahun damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Indonesia. Seegera tidak ada urgensi dengan penambahan batalyon baru di Aceh.

"Apa urgensinya dengan penambahan batalyon di Aceh? apa Aceh lagi bergejolak? ini aneh penambahan ini tidak berdasar," ujarnya.

Massa aksi juga khawatir penambahan batalyon dapat membuka potensi penguasaan tanah-tanah rakyat oleh TNI, termasuk wilayah-wilayah tambang dan aset penting di Aceh.

"Kalau batalyon ini tidak dicegat, kita khawatir ke depan TNI akan menguasai tanah-tanah termasuk tambang-tambang yang akan dikelola. Itu yang kita takutkan, rakyat Aceh tidak dapat kesejahteraan sama sekali," ucapnya.

Selain menolak penambahan Batalyon baru massa juga menyuarakan agar tanah wakaf Blang Padang yang saat ini masih dikelola oleh TNI AD melalui Kodam Iskandar Muda dikembalikan ke Masjid Raya Baiturrahman sebagai nazir wakaf.

Sebelumnya Kepala Staf Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Kasdam IM), Brigadir Jenderal TNI Aji Supriatna mengatakan pembangunan batalyon ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat terkait pertahanan negara. (cnni/js)

## Roy Suryo Diperiksa .....

Dari Halaman 1

ada yang mengatasnakan pengacara. Itu kan aneh, pengacara kok malah lapor, jadi itu sama sekali di luar nurlu ya," ujarnya.

Polda Metro Jaya tengah mengusut enam laporan polisi terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi.

Dari enam laporan itu, salah satunya dilaporkan langsung oleh Jokowi.

Jokowi melayangkan laporan terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik tuduhan ijazah palsu. Dalam laporan itu, Jokowi melaporkan soal dugaan pelanggaran Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 305 Jo 51 ayat 1 UU ITE.

Polisi telah mengantongi sejumlah barang bukti yang diserahkan ke kepolisian saat Jokowi dan tim kuasa hukum membuat laporan, antara lain flashdisk berisi 24 tautan video Youtube dan konten media sosial X hingga fotokopi ijazah.

Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah pihak dalam proses penyelidikan laporan tersebut. Antara lain, Roy Suryo, Tifauzia alias dokter Tifa, Michael Sinaga Rismom Hasiholan Sianipar hingga Kader PSI Dian Sandi.(cnni/js)



## Siapa Orang Bahagia

Dari Halaman 1

dengan Allah, dan sikap hati yang ikhlas menerima takdir. Bahagia bukanlah hasil dari memiliki segalanya, tetapi dari menyukuri apa yang telah Allah titipkan kepada kita, sekecil apapun itu.

Dalam Al-Qur'an, kebahagiaan disebut dalam dua sisi: dunia dan akhirat. Doa yang sangat mudah furuk bahkan menyatukan keduanya: "Rabbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanah wa fil-akhirati hasanah wa qinaa 'adzaaban-naar." (QS. Al-Baqarah: 201). Dalam doa ini, seorang Muslim diajarkan untuk tidak hanya berdagang kesenangan dunia, tapi juga keselamatan akhirat.

Artinya, Islam tidak menolak kebahagiaan dunia, tapi mengarahkannya agar tidak menjadi tujuan akhir. Kekayaan, jabatan, dan prestasi boleh dikejar, tapi jangan sampai membuat lalai. Yang paling penting adalah bagaimana semua itu mendekatkan seseorang pada Allah, bukan menjauhkan.

Seorang fakir yang hatinya ridha bisa lebih bahagia daripada miliuner yang hatinya gelisah. Dalam salah satu sabda Rasulullah, disebutkan: "Bukanlah kekayaan itu banyaknya harta, tetapi kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa (al-ghina an-nafs)." (HR. Bukhari dan Muslim).

Kita hidup di zaman yang sibuk mencari validasi dari luar. Bahagia sering dimaknai dengan pengakuan, perhatian, atau pujian dari orang lain. Namun Al-Qur'an memberikan parameter lain: "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenang." (QS. Ar-Ra'd: 28).

Dalam pandangan Islam, kebahagiaan adalah ketenangan jiwa yang lahir dari kedekatan dengan Allah, dari keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas izin-Nya, dan dari kesadaran bahwa dunia ini sementara.

Itulah sebabnya orang-orang saleh terdahulu tetap bisa bahagia meskipun diuji dengan kemiskinan, sakit, atau kehilangan. Mereka menjadikan sabar, syukur, dan qana'ah (merasa cukup) sebagai kunci utama kebahagiaan.

Berbeda dengan anggapan umum bahwa kebahagiaan adalah perasaan pasif yang datang atau pergi, Islam mengajarkan bahwa bahagia adalah pilihan dan bisa diupayakan.

Bagaimana caranya?

1. Bangun iman yang kokoh. Iman kepada Allah, qadha dan qadar, membuat seseorang tenang menghadapi berbagai cobaan.
2. Perbanyak syukur. Rasulullah bersabda, "Lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kalian (dalam hal dunia), jangan melihat kepada orang yang di atas kalian..." (HR. Muslim). Ini melatih rasa cukup dan mencegah iri.
3. Perkuat dzikir dan salat. Kegiatan ibadah bukan sekadar kewajiban, tapi juga sarana menenangkan hati.
4. Tebar kebaikan. Rasulullah menyebut orang yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ternyata memberi itu membahagiakan.
5. Tundukkan hawa nafsu. Banyak penderitaan justru lahir dari keinginan yang tak terbatas.

Tak sedikit orang yang hanya merasa bahagia ketika mendapat nikmat, lalu merasa menderita saat ditimpa ujian. Padahal dalam Islam, ujian pun bisa menjadi sumber kebahagiaan jika disikapi dengan benar. Ujian adalah jalan naiknya derajat dan penghapusan dosa.

"Sungguh menakutkan perkara seorang mukmin. Semua urusannya baik baginya. Jika mendapat kesenangan, dia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapat kesusahan, dia bersabar, itu pun baik baginya." (HR. Muslim)

Inilah rumus bahagia versi langit. Tidak tergantung situasi. Tidak ditentukan oleh jumlah like di media sosial. Tapi bersumber dari keimanan dan kesadaran akan tujuan hidup.

Pada akhirnya, kebahagiaan dalam Islam adalah perjalanan ruhani menuju ridha Allah. Saat seorang Muslim merasa cukup, menerima takdir, dan tetap semangat berbuat baik di tengah ujian, maka dia telah menggapai salah satu puncak kebahagiaan.

Bahagia bukan sekadar tertawa, bersorak, atau merasa senang. Bahagia adalah ketika hati tenang, dosa berkurang, amal bertambah, dan langkah hidup mendekati surga.

Dalam dunia yang serba cepat dan penuh distraksi, Islam mengajak kita untuk kembali ke pusat: hati yang damai karena yakin Allah selalu bersama kita.